Science and Education Journal
Vol 5 No 3 (2026)
E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Memaknai Upah Layak: Studi Fenomenologi Pada Pengalaman Pekerja Di Sektor Industri

Sheli Fitriani[1], Dewi Noor Azijah[2], Mochamad Faizal Rizki[3]
[1]shelifitriani181104@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Karawang dikenal sebagai salah satu pusat kawasan industri terbesar di Indonesia dengan nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berada di antara yang tertinggi secara nasional. Namun demikian, besaran UMK yang tinggi tidak serta-merta menunjukkan bahwa pekerja telah merasakan terpenuhinya makna upah layak dalam kehidupan mereka. Selama ini, penelitian mengenai pengupahan lebih banyak berfokus pada aspek normatif, ekonomi, dan regulasi, sementara pengalaman subjektif pekerja sebagai pihak yang secara langsung menerima dampak kebijakan pengupahan masih belum banyak dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna upah layak berdasarkan pengalaman hidup pekerja sektor industri di Kabupaten Karawang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi transendental Clark Moustakas. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap pekerja tetap dan pekerja kontrak pada industri otomotif, yang didukung oleh observasi serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan *epoche, phenomenological reduction, imaginative variation, dan synthesis of meanings and essences.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah layak tidak hanya dipahami sebagai besarnya pendapatan yang diterima, tetapi juga sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, memberikan rasa aman bagi keberlangsungan ekonomi keluarga, menghadapi ketidakpastian pekerjaan, serta mewujudkan harapan terhadap masa depan. Temuan ini menunjukkan bahwa makna upah layak dibentuk melalui pengalaman sosial pekerja, sehingga evaluasi kebijakan pengupahan perlu mempertimbangkan dimensi subjektif selain indikator ekonomi.
Kata Kunci: *upah layak, fenomenologi, pekerja industri, pengalaman hidup, Karawang.*

Abstract

Karawang Regency is one of Indonesia's largest industrial centers and has one of the highest Regency Minimum Wage (UMK) levels in the country. However, a high minimum wage does not necessarily reflect workers' perceptions of what constitutes a decent wage. Existing studies on wage policy have primarily emphasized economic, regulatory, and normative dimensions, while workers' lived experiences as the direct recipients of wage policies have received limited scholarly attention. This study aims to explore how industrial workers construct the meaning of a decent wage based on their work and everyday life experiences in Karawang Regency. A qualitative approach using Clark Moustakas' transcendental phenomenological method was employed. Data were collected through in-depth interviews with permanent and contract workers in the automotive industry, complemented by observation and documentation. Data analysis followed the stages of epoche, phenomenological reduction, imaginative variation, and synthesis of meanings and essences. The findings indicate that workers perceive a decent wage not merely as the amount of income received, but as the capacity to meet daily living needs, ensure family economic security, cope with employment uncertainty, and sustain hope for the future. These findings suggest that the meaning of a decent wage is socially constructed through workers' lived experiences. Therefore, the evaluation of wage policies should incorporate workers' subjective perspectives alongside conventional economic indicators.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Keywords: *decent wage, phenomenology, industri workers, lived experience, Karawang.*

Corresponding Author:
Sheli Fitriani

shelifitriani181104@gmail.com

PENDAHULUAN

Upah merupakan salah satu instrumen utama dalam hubungan industrial yang berfungsi sebagai kompensasi atas pekerjaan sekaligus sumber penghidupan bagi pekerja dan keluarganya. Selain memiliki dimensi ekonomi, upah juga mengandung dimensi sosial karena berkaitan dengan kesejahteraan, kualitas hidup, produktivitas, dan keberlangsungan hubungan kerja. Oleh karena itu, kebijakan pengupahan menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha. Di Indonesia, kebijakan tersebut diwujudkan melalui penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebagai standar penghasilan minimum bagi pekerja. Namun, kelayakan upah tidak selalu dapat diukur dari besarnya nominal yang diterima, karena dipengaruhi oleh pengalaman hidup, kondisi sosial, dan kebutuhan setiap pekerja.

Perkembangan ekonomi, meningkatnya biaya hidup, serta dinamika pasar tenaga kerja menjadikan isu upah layak terus menjadi perhatian pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, pemerintah menetapkan bahwa penyesuaian upah minimum didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator tertentu. Meskipun demikian, pendekatan tersebut masih berorientasi pada indikator makroekonomi sehingga belum sepenuhnya mampu menggambarkan bagaimana pekerja memaknai kelayakan upah berdasarkan pengalaman hidup yang mereka alami.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi serta nilai UMK yang termasuk tertinggi secara nasional. Kondisi tersebut menjadikan Karawang sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan pengupahan. Di sisi lain, tingginya UMK tidak selalu berbanding lurus dengan persepsi pekerja mengenai upah yang layak. Peningkatan biaya hidup, tanggung jawab keluarga, perubahan status pekerjaan, serta ketidakpastian hubungan kerja menjadi faktor yang memengaruhi cara pekerja menilai kecukupan penghasilan yang mereka terima.

Kajian mengenai upah minimum selama ini umumnya berfokus pada perspektif ekonomi, hukum, dan kebijakan publik, seperti pengaruhnya terhadap produktivitas, kesempatan kerja, investasi, daya saing industri, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan pekerja. Meskipun memberikan kontribusi penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pengupahan, sebagian besar penelitian masih menitikberatkan pada indikator objektif dan kuantitatif. Akibatnya, pengalaman subjektif pekerja sebagai penerima langsung kebijakan pengupahan masih relatif kurang mendapat perhatian.

Pendekatan fenomenologi menawarkan perspektif yang berbeda dengan menempatkan pengalaman hidup *(lived experience)* sebagai dasar dalam memahami suatu fenomena. Dalam konteks penelitian ini, pengalaman memenuhi kebutuhan hidup, menjalankan tanggung jawab keluarga, menghadapi ketidakpastian pekerjaan, serta membangun harapan terhadap masa depan menjadi bagian penting dalam membentuk pemaknaan pekerja mengenai upah layak. Namun, penelitian yang mengkaji makna upah layak melalui pendekatan fenomenologi, khususnya pada pekerja sektor industri di Kabupaten Karawang, masih sangat terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* antara dominasi

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

kajian normatif dan kuantitatif dengan kebutuhan untuk memahami pengalaman subjektif pekerja.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi transendental Clark Moustakas untuk mengeksplorasi pengalaman pekerja sektor industri di Kabupaten Karawang dalam memaknai upah layak. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya memandang upah layak sebagai konstruksi pengalaman hidup pekerja, bukan semata-mata sebagai standar normatif yang ditetapkan melalui kebijakan pemerintah. Dengan menempatkan pekerja sebagai subjek utama penelitian, studi ini diharapkan dapat memperkaya kajian fenomenologi dalam bidang kebijakan publik dan ketenagakerjaan, sekaligus memberikan perspektif baru mengenai dimensi subjektif kesejahteraan pekerja.

Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana pekerja sektor industri di Kabupaten Karawang memaknai upah layak berdasarkan pengalaman kerja dan kehidupan sehari-hari mereka. Temuan penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian kebijakan pengupahan berbasis fenomenologi serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah, dewan pengupahan, dan perusahaan dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya mempertimbangkan indikator ekonomi dan regulasi, tetapi juga pengalaman nyata pekerja sebagai penerima langsung kebijakan pengupahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi transendental Clark Moustakas untuk memahami esensi pengalaman hidup (lived experience) pekerja dalam memaknai upah layak. Penelitian berpijak pada paradigma konstruktivisme yang memandang bahwa makna upah dibentuk melalui pengalaman, interaksi sosial, dan interpretasi individu terhadap realitas yang mereka alami, bukan semata-mata ditentukan oleh regulasi atau besaran nominal upah.

Partisipan penelitian berjumlah 10 pekerja sektor industri di Kabupaten Karawang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Informan terdiri atas pekerja tetap dan pekerja kontrak berusia maksimal 35 tahun dengan masa kerja tidak lebih dari dua tahun di perusahaan tempat mereka bekerja. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur sebagai teknik utama, yang didukung oleh observasi nonpartisipatif dan studi dokumentasi terhadap regulasi ketenagakerjaan, kebijakan pengupahan, serta catatan lapangan.

Analisis data mengikuti tahapan fenomenologi transendental yang meliputi epoche, phenomenological reduction, imaginative variation, dan synthesis of meanings and essences untuk mengidentifikasi esensi pengalaman partisipan. Keabsahan data dijamin melalui penerapan kriteria trustworthiness, yaitu credibility, transferability, dependability, dan confirmability, dengan menerapkan member checking, penyusunan audit trail, penyajian thick description, serta refleksivitas peneliti selama proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upah sebagai Sarana Pemenuhan Kebutuhan Hidup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan upah layak oleh pekerja sektor industri di Kabupaten Karawang berangkat dari pengalaman memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seluruh partisipan memandang bahwa upah merupakan sumber penghasilan utama yang menentukan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, tempat tinggal, transportasi, kesehatan, dan kebutuhan rutin lainnya. Dalam pengalaman para partisipan, kelayakan upah tidak diukur dari besarnya nominal yang diterima, melainkan dari sejauh mana penghasilan tersebut mampu mencukupi kebutuhan hidup secara berkelanjutan. Oleh karena itu, upah dipahami sebagai instrumen yang memungkinkan pekerja mempertahankan keberlangsungan kehidupannya di tengah meningkatnya biaya hidup dan berbagai tuntutan ekonomi yang terus berkembang.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Pengalaman para partisipan memperlihatkan bahwa setiap penerimaan upah selalu diikuti dengan proses penentuan prioritas kebutuhan. Sebagian besar penghasilan dialokasikan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan primer sebelum digunakan untuk kebutuhan lain. Pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, biaya tempat tinggal, transportasi menuju tempat kerja, pembayaran utilitas, serta kebutuhan kesehatan menjadi komponen yang paling banyak menyerap pendapatan pekerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upah tidak dimaknai sebagai simbol keberhasilan ekonomi semata, tetapi sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan aktivitas hidup sehari-hari. Ketika seluruh kebutuhan pokok dapat dipenuhi tanpa mengalami kekurangan yang berarti, para pekerja cenderung memandang bahwa upah yang diterima telah memenuhi unsur kelayakan. Sebaliknya, apabila penghasilan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar secara memadai, pekerja menganggap bahwa upah tersebut belum dapat dikategorikan sebagai upah yang layak.

Meskipun bekerja pada kawasan industri yang memiliki nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) relatif tinggi dibandingkan daerah lain, para partisipan tetap menilai bahwa besarnya upah belum tentu mencerminkan tingkat kesejahteraan yang mereka rasakan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan kondisi ekonomi setiap pekerja, seperti jumlah tanggungan keluarga, biaya tempat tinggal, biaya transportasi, maupun kebutuhan lain yang harus dipenuhi setiap bulan. Temuan ini menunjukkan bahwa konsep upah layak bersifat kontekstual karena dipengaruhi oleh pengalaman hidup masing-masing individu. Dengan demikian, standar nominal yang sama dapat dimaknai secara berbeda oleh setiap pekerja sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi yang mereka hadapi.

Dalam perspektif fenomenologi transendental, pengalaman memenuhi kebutuhan hidup merupakan lived experience yang membentuk kesadaran individu terhadap makna suatu fenomena. Clark Moustakas menjelaskan bahwa makna tidak muncul dari konsep-konsep yang bersifat abstrak, tetapi dibangun melalui pengalaman sadar individu ketika berinteraksi dengan realitas kehidupan. Pada penelitian ini, pengalaman pekerja dalam mengelola penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi dasar terbentuknya pemahaman mengenai upah layak. Upah memperoleh makna karena berkaitan langsung dengan kemampuan pekerja untuk mempertahankan kehidupannya, sehingga pengalaman tersebut menjadi inti dalam proses pembentukan makna.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann yang menjelaskan bahwa realitas sosial dibentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Pengalaman pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari merupakan bentuk eksternalisasi yang kemudian berkembang menjadi pemahaman bersama mengenai arti penting upah. Melalui proses tersebut, para pekerja menginternalisasi pengalaman mereka menjadi keyakinan bahwa upah yang layak adalah upah yang mampu memberikan kepastian dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan demikian, makna upah layak tidak bersifat universal, tetapi merupakan hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui pengalaman hidup masing-masing individu.

Perspektif interpretatif Mark Bevir turut memberikan pemahaman bahwa makna suatu kebijakan tidak ditentukan hanya oleh isi regulasi, tetapi juga oleh interpretasi individu yang mengalaminya. Dalam konteks kebijakan pengupahan, pemerintah menetapkan upah minimum sebagai standar perlindungan bagi pekerja. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa para partisipan tidak secara otomatis menyamakan upah minimum dengan upah layak. Mereka menafsirkan kebijakan tersebut berdasarkan pengalaman nyata dalam memenuhi kebutuhan hidup. Selama penghasilan yang diterima belum mampu memberikan kecukupan dalam kehidupan sehari-hari, pekerja tetap memandang bahwa upah tersebut belum sepenuhnya memenuhi makna kelayakan. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengupahan dipahami secara berbeda oleh setiap pekerja sesuai dengan kondisi kehidupan yang mereka alami.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Hasil penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan konsep decent work yang dikembangkan oleh International Labour Organization (ILO). Salah satu prinsip utama decent work adalah tersedianya pekerjaan yang memberikan penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja secara bermartabat. Pengalaman para partisipan menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup merupakan indikator pertama yang digunakan untuk menilai kualitas suatu pekerjaan. Ketika penghasilan mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak, pekerja akan merasakan adanya kesejahteraan dan keamanan ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya, apabila penghasilan hanya mampu memenuhi sebagian kebutuhan hidup, pekerja cenderung mengalami tekanan ekonomi yang memengaruhi kualitas kehidupannya.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa pemenuhan kebutuhan hidup merupakan fondasi utama dalam pemaknaan upah layak bagi pekerja sektor industri di Kabupaten Karawang. Upah dipandang sebagai sarana untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan melalui kemampuan memenuhi berbagai kebutuhan dasar yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Makna tersebut tidak lahir dari besarnya nominal penghasilan semata, tetapi dari pengalaman pekerja dalam mengelola penghasilan agar mampu memenuhi tuntutan kehidupan yang terus berkembang. Dengan demikian, upah layak merupakan pengalaman yang dibangun melalui interaksi antara kondisi ekonomi, kebutuhan hidup, serta interpretasi subjektif pekerja terhadap realitas yang mereka hadapi.

2. Upah sebagai Bentuk Tanggung Jawab Keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja sektor industri di Kabupaten Karawang memaknai upah layak tidak hanya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keluarga. Pengalaman para partisipan memperlihatkan bahwa penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan memiliki makna yang lebih luas dibandingkan sekadar kompensasi atas tenaga dan waktu yang diberikan kepada perusahaan. Upah dipahami sebagai sumber daya utama yang memungkinkan pekerja menjalankan perannya sebagai anggota keluarga, baik sebagai anak, pasangan, maupun orang tua. Oleh karena itu, pemaknaan terhadap upah layak berkembang seiring dengan tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh masing-masing pekerja. Semakin besar tanggung jawab keluarga yang harus dipenuhi, semakin besar pula harapan pekerja terhadap kecukupan penghasilan yang diterima.

Pengalaman para partisipan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan cara memaknai upah antara pekerja yang telah berkeluarga dan pekerja yang belum menikah. Bagi pekerja yang telah menikah, penghasilan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti biaya makan, pendidikan anak, kesehatan, tempat tinggal, serta berbagai kebutuhan keluarga lainnya. Dalam kondisi tersebut, upah layak dimaknai sebagai penghasilan yang mampu menjamin keberlangsungan kehidupan seluruh anggota keluarga, bukan hanya kebutuhan individu. Sebaliknya, bagi pekerja yang belum menikah, penghasilan lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, meskipun sebagian besar partisipan tetap menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membantu orang tua maupun saudara di daerah asal. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman hidup dan struktur keluarga membentuk cara pekerja menginterpretasikan arti penting upah dalam kehidupan mereka.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa pemenuhan tanggung jawab keluarga sering kali menjadi dasar utama dalam menilai kecukupan penghasilan. Para partisipan mengungkapkan bahwa besarnya nominal upah tidak selalu menjadi ukuran utama apabila penghasilan tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara menyeluruh. Sebaliknya, pekerja yang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga cenderung menilai bahwa penghasilan yang diterima telah mencerminkan upah yang layak. Kondisi ini menunjukkan bahwa makna upah layak tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi individu, tetapi juga oleh hubungan sosial yang melekat pada kehidupan pekerja sebagai bagian dari keluarga.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Dalam perspektif fenomenologi transendental, pengalaman menjalankan tanggung jawab keluarga merupakan pengalaman sadar *(conscious experience)* yang membentuk esensi pemaknaan upah. Clark Moustakas menjelaskan bahwa suatu fenomena dipahami melalui pengalaman langsung yang dialami individu dalam kehidupan sehari-hari. Pada penelitian ini, pengalaman memenuhi kebutuhan keluarga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengalaman pekerja dalam memaknai upah layak. Upah memperoleh arti karena memungkinkan pekerja menjalankan peran sosial yang mereka emban, sehingga makna upah tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dengan nilai tanggung jawab, kepedulian, dan keberlangsungan kehidupan keluarga.

Temuan tersebut juga dapat dijelaskan melalui teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann yang menyatakan bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan masyarakat. Tanggung jawab terhadap keluarga merupakan realitas sosial yang diinternalisasi oleh para pekerja melalui pengalaman hidup mereka. Pengalaman tersebut kemudian membentuk keyakinan bahwa bekerja bukan sekadar memperoleh penghasilan, tetapi juga menjalankan kewajiban moral terhadap keluarga. Dengan demikian, upah layak dipahami sebagai penghasilan yang mampu mendukung pekerja dalam memenuhi tuntutan peran sosial tersebut. Makna ini berkembang melalui proses interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya sehingga menghasilkan persepsi yang berbeda pada setiap pekerja sesuai dengan kondisi keluarga yang dimiliki.

Perspektif interpretatif Mark Bevir juga memberikan penjelasan bahwa setiap individu akan menginterpretasikan suatu kebijakan berdasarkan pengalaman dan tradisi yang melatarbelakanginya. Dalam konteks penelitian ini, para pekerja tidak memaknai kebijakan pengupahan hanya berdasarkan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang ditetapkan pemerintah. Mereka mengaitkan kebijakan tersebut dengan kemampuan penghasilan dalam memenuhi tanggung jawab terhadap keluarga. Oleh karena itu, meskipun besaran upah minimum telah mengalami peningkatan, sebagian pekerja tetap menilai bahwa penghasilan tersebut belum sepenuhnya layak apabila belum mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga secara memadai. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi pekerja terhadap kebijakan pengupahan dipengaruhi oleh pengalaman sosial yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kesejahteraan pekerja tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tetapi juga oleh kemampuan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Penelitian mengenai kesejahteraan pekerja menunjukkan bahwa beban tanggungan keluarga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi persepsi terhadap kecukupan pendapatan. Namun demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih mendalam melalui pendekatan fenomenologi transendental. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi hubungan antara pendapatan dan kesejahteraan keluarga, tetapi juga mengungkap bagaimana pengalaman menjalankan tanggung jawab keluarga membentuk makna subjektif mengenai upah layak. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian mengenai pengupahan dengan menghadirkan pengalaman hidup pekerja sebagai fokus utama analisis.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan perlu mempertimbangkan dimensi sosial yang melekat pada kehidupan pekerja. Penetapan upah minimum sebagai instrumen perlindungan tenaga kerja memang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hubungan industrial. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja menilai kelayakan upah berdasarkan kemampuan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang terus berkembang. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan pengupahan tidak hanya perlu mempertimbangkan indikator ekonomi makro, tetapi juga memperhatikan kondisi riil pekerja dan beban tanggungan yang mereka hadapi. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pekerja sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut dapat dipahami bahwa tanggung jawab terhadap keluarga merupakan salah satu dimensi utama dalam pemaknaan upah layak. Pengalaman pekerja menunjukkan bahwa upah dipandang sebagai sarana untuk menjalankan kewajiban sosial sekaligus menjamin keberlangsungan kehidupan keluarga. Dengan demikian, makna upah layak tidak hanya ditentukan oleh besarnya nominal penghasilan, tetapi juga oleh kemampuan penghasilan tersebut dalam mendukung pekerja menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari keluarga. Temuan ini menegaskan bahwa upah layak merupakan fenomena yang memiliki dimensi ekonomi sekaligus dimensi sosial yang saling berkaitan dalam pengalaman hidup pekerja.

3. Pengalaman Kemandirian dan Merantau

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman merantau menjadi salah satu aspek yang membentuk pemaknaan pekerja terhadap upah layak. Bagi partisipan yang berasal dari luar Kabupaten Karawang, keputusan untuk bekerja di kawasan industri tidak hanya dipandang sebagai upaya memperoleh pekerjaan, tetapi juga sebagai proses membangun kehidupan yang mandiri di lingkungan yang baru. Kondisi tersebut mengharuskan pekerja beradaptasi dengan berbagai tantangan, mulai dari memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri, mengatur pengeluaran sehari-hari, hingga menjaga hubungan dengan keluarga yang berada di daerah asal. Dalam pengalaman tersebut, upah memperoleh makna yang lebih luas karena menjadi sumber utama yang memungkinkan pekerja mempertahankan keberlangsungan hidup sekaligus menjalankan tanggung jawab terhadap keluarga meskipun berada di tempat yang berbeda.

Pengalaman hidup sebagai perantau memperlihatkan bahwa sebagian besar partisipan harus mengalokasikan penghasilannya untuk berbagai kebutuhan yang sebelumnya tidak mereka tanggung ketika tinggal bersama keluarga. Pengeluaran untuk biaya tempat tinggal, konsumsi harian, transportasi, komunikasi, serta kebutuhan pribadi menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi secara mandiri. Selain itu, beberapa partisipan tetap menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membantu orang tua maupun anggota keluarga di kampung halaman. Kondisi tersebut menyebabkan pekerja dituntut untuk mengelola keuangan secara lebih cermat agar mampu memenuhi kebutuhan hidup di daerah tempat bekerja tanpa mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarga di daerah asal. Pengalaman ini menunjukkan bahwa upah layak dipahami sebagai penghasilan yang mampu memberikan keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan kewajiban sosial yang tetap melekat meskipun pekerja berada jauh dari keluarganya.

Bagi para partisipan, merantau juga dimaknai sebagai proses pembelajaran menuju kemandirian. Mereka mengungkapkan bahwa bekerja di kawasan industri memberikan kesempatan untuk belajar mengambil keputusan secara mandiri, mengelola keuangan, menentukan prioritas kebutuhan, serta bertanggung jawab atas kehidupan yang dijalani. Pengalaman tersebut membentuk pemahaman bahwa upah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi simbol keberhasilan dalam membangun kehidupan yang lebih mandiri. Dengan demikian, kelayakan upah tidak hanya diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga dari kemampuan penghasilan dalam mendukung proses kemandirian yang sedang dijalani oleh para pekerja.

Melalui perspektif fenomenologi transendental, pengalaman merantau merupakan bagian dari *lived experience* yang memberikan makna mendalam terhadap konsep upah layak. Clark Moustakas menjelaskan bahwa pengalaman yang dialami secara langsung akan membentuk kesadaran individu terhadap suatu fenomena. Dalam penelitian ini, pengalaman hidup jauh dari keluarga, menghadapi tantangan ekonomi secara mandiri, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru menjadi pengalaman yang secara konsisten muncul dalam narasi para partisipan. Pengalaman tersebut menjadikan upah bukan sekadar balas jasa atas pekerjaan, tetapi sebagai sarana yang memungkinkan pekerja mempertahankan identitasnya sebagai individu yang mandiri sekaligus tetap menjalankan tanggung jawab terhadap keluarga.

Temuan penelitian ini juga dapat dipahami melalui teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann. Menurut teori tersebut, realitas sosial dibentuk melalui proses interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya. Pengalaman merantau menghadirkan lingkungan sosial yang baru sehingga pekerja harus membangun pola kehidupan, hubungan sosial, dan cara pandang yang

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

berbeda dibandingkan ketika masih tinggal bersama keluarga. Proses adaptasi tersebut membentuk konstruksi baru mengenai makna upah. Upah tidak lagi dipahami hanya sebagai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga sebagai simbol keberhasilan dalam menjalani kehidupan yang mandiri serta sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keluarga yang tetap dipertahankan meskipun berada di tempat yang berbeda.

Perspektif interpretatif Mark Bevir juga memberikan penjelasan bahwa individu memberikan makna terhadap suatu kebijakan berdasarkan pengalaman hidup yang dimilikinya. Dalam konteks penelitian ini, para pekerja perantau menginterpretasikan kebijakan pengupahan berdasarkan kemampuan upah dalam mendukung kehidupan mandiri yang mereka jalani. Bagi mereka, besarnya Upah Minimum Kabupaten tidak hanya dinilai dari nominal yang diterima, tetapi juga dari sejauh mana penghasilan tersebut mampu memenuhi kebutuhan hidup di daerah perantauan yang memiliki biaya hidup relatif tinggi. Oleh karena itu, pengalaman merantau menjadi faktor yang memengaruhi cara pekerja memaknai kelayakan upah.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pengalaman merantau memberikan dimensi yang berbeda dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengupahan. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada hubungan antara tingkat upah dan kesejahteraan pekerja secara umum, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa mobilitas tenaga kerja turut memengaruhi pemaknaan terhadap upah layak. Pengalaman hidup sebagai perantau menyebabkan pekerja memiliki kebutuhan ekonomi yang lebih kompleks karena harus memenuhi kebutuhan hidup sendiri sekaligus mempertahankan hubungan ekonomi dengan keluarga di daerah asal. Kondisi tersebut menjadikan upah sebagai instrumen yang tidak hanya mendukung keberlangsungan hidup individu, tetapi juga menjaga hubungan sosial dan ekonomi dengan keluarga.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa karakteristik pekerja perantau perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan maupun kebijakan pengupahan. Kawasan industri seperti Kabupaten Karawang menjadi tujuan bagi banyak tenaga kerja dari berbagai daerah sehingga kebutuhan hidup pekerja tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi lokal, tetapi juga oleh kewajiban ekonomi yang masih mereka miliki di daerah asal. Oleh karena itu, kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pekerja perlu mempertimbangkan karakteristik mobilitas tenaga kerja serta kondisi sosial yang melatarbelakangi kehidupan para pekerja perantau.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa pengalaman kemandirian dan merantau merupakan dimensi penting dalam pemaknaan upah layak. Upah dipandang sebagai sarana yang memungkinkan pekerja membangun kehidupan yang mandiri, memenuhi kebutuhan hidup di daerah perantauan, serta tetap menjalankan tanggung jawab terhadap keluarga di kampung halaman. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa makna upah layak dibentuk melalui proses adaptasi terhadap lingkungan baru, pengalaman mengelola kehidupan secara mandiri, dan kemampuan mempertahankan hubungan sosial dengan keluarga. Dengan demikian, pengalaman merantau memperluas pemahaman mengenai upah layak sebagai fenomena yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dengan proses pembentukan identitas, kemandirian, dan tanggung jawab sosial pekerja.

4. Ketidakpastian Kerja dan Pencarian Rasa Aman

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman menghadapi ketidakpastian kerja menjadi salah satu faktor yang membentuk pemaknaan pekerja terhadap upah layak. Bagi para partisipan, kelayakan upah tidak hanya diukur dari besarnya penghasilan yang diterima setiap bulan, tetapi juga dari kemampuan pekerjaan tersebut memberikan rasa aman terhadap keberlangsungan kehidupan mereka. Pengalaman bekerja di sektor industri memperlihatkan bahwa pekerja tidak hanya menghadapi tuntutan produktivitas, tetapi juga berbagai ketidakpastian yang berkaitan dengan status hubungan kerja, keberlanjutan kontrak, perubahan kondisi perusahaan, hingga kemungkinan kehilangan pekerjaan. Situasi tersebut menyebabkan upah dipandang tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan kepastian dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Berdasarkan pengalaman para partisipan, rasa aman dalam bekerja berkaitan erat dengan kepastian memperoleh penghasilan secara berkelanjutan. Pekerja yang memiliki status kontrak mengungkapkan bahwa berakhirnya masa kontrak selalu menjadi sumber kekhawatiran karena dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun menjalankan tanggung jawab terhadap keluarga. Sebaliknya, pekerja dengan status tetap cenderung memiliki rasa aman yang lebih tinggi karena adanya kepastian hubungan kerja memungkinkan mereka menyusun perencanaan keuangan dalam jangka panjang. Perbedaan pengalaman tersebut menunjukkan bahwa status pekerjaan turut memengaruhi cara pekerja memaknai kelayakan upah. Penghasilan dengan nominal yang sama dapat dipersepsikan berbeda apabila tidak disertai dengan kepastian kerja yang memadai.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa rasa aman tidak hanya berkaitan dengan status pekerjaan, tetapi juga dengan kondisi perusahaan tempat pekerja bekerja. Para partisipan menyadari bahwa perubahan kondisi ekonomi, penurunan permintaan pasar, maupun kebijakan efisiensi perusahaan dapat berdampak pada keberlangsungan pekerjaan mereka. Kesadaran terhadap berbagai risiko tersebut membentuk pengalaman bahwa upah layak harus mampu memberikan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya gangguan ekonomi yang dapat memengaruhi kehidupan pekerja.

Dalam perspektif fenomenologi transendental, pengalaman menghadapi ketidakpastian kerja merupakan *lived experience* yang membentuk kesadaran pekerja mengenai arti penting upah. Clark Moustakas menjelaskan bahwa pengalaman yang dialami secara langsung menjadi dasar dalam memahami makna suatu fenomena. Pada penelitian ini, pengalaman menghadapi ketidakpastian hubungan kerja, kekhawatiran terhadap masa depan pekerjaan, serta kebutuhan memperoleh kepastian ekonomi membentuk pemahaman bahwa upah layak harus mampu menghadirkan rasa aman.

Temuan penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui perspektif interpretatif Mark Bevir yang memandang bahwa kebijakan publik memperoleh makna melalui proses interpretasi yang dilakukan oleh aktor yang mengalaminya. Dalam konteks penelitian ini, para pekerja menginterpretasikan kebijakan pengupahan berdasarkan pengalaman mereka dalam dunia kerja. Meskipun pemerintah telah menetapkan upah minimum sebagai bentuk perlindungan normatif bagi pekerja, para partisipan menilai bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan rasa aman apabila tidak disertai dengan kepastian hubungan kerja dan perlindungan terhadap keberlangsungan pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pengupahan tidak hanya ditentukan oleh besaran nominal upah, tetapi juga oleh kemampuan kebijakan tersebut menciptakan kondisi kerja yang stabil dan memberikan kepastian bagi pekerja.

Hasil penelitian ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsep decent work yang dikembangkan oleh International Labour Organization (ILO). Konsep tersebut menekankan bahwa pekerjaan yang layak tidak hanya menyediakan penghasilan yang memadai, tetapi juga menjamin keamanan kerja *(security at work),* perlindungan sosial, penghormatan terhadap hak-hak pekerja, serta kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang produktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa para partisipan memiliki pemahaman yang sejalan dengan konsep tersebut. Mereka memaknai upah layak sebagai bagian dari sistem pekerjaan yang mampu memberikan rasa aman terhadap keberlangsungan kehidupan, bukan hanya sebagai imbalan finansial atas pekerjaan yang dilakukan. Dengan demikian, pengalaman pekerja memperlihatkan bahwa keamanan kerja merupakan elemen penting dalam membentuk persepsi mengenai upah layak.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan perlu dipadukan dengan kebijakan ketenagakerjaan yang mampu memberikan kepastian hubungan kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja. Penetapan upah minimum sebagai instrumen perlindungan ekonomi akan lebih efektif apabila didukung oleh sistem hubungan industrial yang memberikan rasa aman kepada pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Pemerintah, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya perlu memperhatikan aspek keamanan kerja sebagai bagian dari

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja secara menyeluruh. Pendekatan tersebut tidak hanya akan memperkuat perlindungan tenaga kerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan hubungan industrial.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa ketidakpastian kerja dan pencarian rasa aman merupakan dimensi penting dalam pemaknaan upah layak. Upah tidak hanya dipahami sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai sarana yang memberikan kepastian terhadap keberlangsungan kehidupan dan pekerjaan. Pengalaman para pekerja menunjukkan bahwa rasa aman merupakan bagian dari kualitas kerja yang mereka harapkan, sehingga makna upah layak dibentuk melalui hubungan yang erat antara kecukupan penghasilan, stabilitas pekerjaan, dan keyakinan terhadap masa depan. Temuan ini menegaskan bahwa upah layak memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan psikologis yang saling berkaitan dalam membentuk kesejahteraan pekerja.

5. Pengalaman Krisis dan Kerentanan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman menghadapi krisis dan kerentanan ekonomi menjadi salah satu dimensi penting dalam pembentukan makna upah layak bagi pekerja sektor industri di Kabupaten Karawang. Para partisipan mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi yang terus berubah, seperti meningkatnya harga kebutuhan pokok, biaya tempat tinggal, biaya transportasi, maupun kebutuhan keluarga yang semakin kompleks, memengaruhi cara mereka memandang kecukupan penghasilan yang diterima. Dalam pengalaman tersebut, upah tidak lagi dipahami hanya sebagai penghasilan rutin yang diterima setiap bulan, tetapi sebagai sumber daya yang harus mampu melindungi pekerja dari berbagai risiko ekonomi yang dapat muncul sewaktu-waktu. Oleh karena itu, kelayakan upah dipersepsikan berdasarkan kemampuan penghasilan dalam menjaga stabilitas kehidupan ketika menghadapi tekanan ekonomi yang tidak dapat diprediksi.

Pengalaman para partisipan menunjukkan bahwa perubahan kondisi ekonomi sering kali menyebabkan pergeseran dalam prioritas pengeluaran rumah tangga. Meningkatnya harga kebutuhan pokok membuat sebagian pekerja harus melakukan penyesuaian terhadap pola konsumsi, mengurangi pengeluaran yang dianggap kurang mendesak, atau menunda pemenuhan kebutuhan tertentu agar kebutuhan utama tetap dapat dipenuhi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kecukupan penghasilan tidak bersifat tetap, melainkan sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi yang terjadi di lingkungan tempat pekerja hidup. Upah yang pada suatu waktu dianggap cukup dapat berubah menjadi tidak lagi memenuhi kebutuhan ketika terjadi peningkatan biaya hidup atau muncul kebutuhan mendesak yang tidak direncanakan.

Selain perubahan harga kebutuhan hidup, para partisipan juga menceritakan pengalaman menghadapi pengeluaran yang bersifat tidak terduga, seperti biaya pengobatan, kebutuhan pendidikan anggota keluarga, maupun kebutuhan mendesak lainnya. Pengeluaran tersebut sering kali mengganggu keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran sehingga pekerja harus melakukan berbagai strategi penyesuaian keuangan. Sebagian partisipan mengaku mengurangi pengeluaran konsumtif, sementara yang lain memilih menggunakan tabungan atau mencari sumber pendapatan tambahan apabila memungkinkan. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kerentanan ekonomi merupakan bagian dari realitas kehidupan pekerja yang secara langsung memengaruhi cara mereka memaknai upah layak.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa keterbatasan kemampuan untuk menabung menjadi salah satu indikator yang digunakan partisipan dalam menilai kelayakan penghasilan. Sebagian besar pekerja menyampaikan bahwa setelah seluruh kebutuhan rutin terpenuhi, sisa penghasilan yang dapat disimpan relatif kecil bahkan pada kondisi tertentu tidak ada sama sekali. Situasi tersebut menyebabkan pekerja merasa rentan ketika menghadapi kebutuhan yang tidak terduga karena tidak memiliki cadangan keuangan yang memadai. Oleh karena itu, bagi para partisipan, upah layak bukan hanya penghasilan yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi saat ini, tetapi juga penghasilan yang memungkinkan pekerja memiliki ruang untuk menabung sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko ekonomi di masa mendatang.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Dalam perspektif fenomenologi transendental, pengalaman menghadapi kerentanan ekonomi merupakan pengalaman hidup *(lived experience)* yang membentuk kesadaran pekerja mengenai makna upah layak. Clark Moustakas menjelaskan bahwa makna suatu fenomena muncul melalui refleksi terhadap pengalaman nyata yang dialami individu. Pada penelitian ini, pengalaman menghadapi kenaikan biaya hidup, keterbatasan pendapatan, serta kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi menjadi pengalaman yang secara konsisten muncul dalam narasi para partisipan. Pengalaman tersebut membentuk kesadaran bahwa upah yang layak bukan hanya penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mampu memberikan perlindungan terhadap berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan.

Temuan penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann. Menurut teori tersebut, pengalaman individu dalam kehidupan sehari-hari menjadi dasar terbentuknya realitas sosial yang kemudian diinternalisasi sebagai pengetahuan bersama. Dalam konteks penelitian ini, pengalaman menghadapi tekanan ekonomi membentuk keyakinan pekerja bahwa kelayakan upah tidak dapat dipisahkan dari kemampuan penghasilan dalam menghadapi situasi krisis. Pengalaman tersebut terus diperkuat melalui interaksi dengan sesama pekerja yang menghadapi kondisi serupa, sehingga berkembang menjadi pemahaman kolektif bahwa upah layak harus mampu memberikan perlindungan terhadap kerentanan ekonomi yang mungkin dialami pekerja maupun keluarganya.

Perspektif interpretatif Mark Bevir juga memberikan penjelasan bahwa makna kebijakan publik dibentuk oleh pengalaman dan interpretasi individu yang mengalaminya. Dalam konteks kebijakan pengupahan, para partisipan tidak hanya menilai kebijakan berdasarkan besarnya Upah Minimum Kabupaten yang ditetapkan pemerintah, tetapi juga berdasarkan kemampuan kebijakan tersebut dalam membantu mereka menghadapi tekanan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika peningkatan upah tidak diikuti dengan kemampuan menjaga daya beli akibat meningkatnya biaya hidup, sebagian pekerja tetap memandang bahwa penghasilan yang diterima belum sepenuhnya memenuhi makna upah layak. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pengupahan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang dihadapi masyarakat secara nyata.

Hasil penelitian ini memperkuat berbagai kajian mengenai hubungan antara tingkat upah dan kesejahteraan pekerja yang menyatakan bahwa perubahan kondisi ekonomi dapat memengaruhi tingkat kecukupan pendapatan. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda karena menempatkan pengalaman pekerja sebagai fokus utama dalam memahami kerentanan ekonomi. Pendekatan fenomenologi transendental memungkinkan penelitian ini menjelaskan bahwa kerentanan ekonomi bukan sekadar kondisi objektif yang diukur melalui besaran pendapatan atau tingkat inflasi, tetapi merupakan pengalaman subjektif yang dirasakan pekerja ketika mereka berupaya mempertahankan keberlangsungan kehidupan di tengah berbagai tekanan ekonomi.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan perlu mempertimbangkan daya tahan ekonomi pekerja terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Penetapan upah minimum sebaiknya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup minimum, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan pekerja dalam membangun ketahanan ekonomi melalui kesempatan menabung, perlindungan sosial, dan jaminan terhadap berbagai risiko kehidupan. Selain itu, perusahaan dapat berkontribusi melalui penyediaan program kesejahteraan pekerja, seperti fasilitas kesehatan, bantuan pendidikan, atau program kesejahteraan lainnya yang mampu mengurangi beban ekonomi pekerja. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap pekerja sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan mereka secara berkelanjutan.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa pengalaman krisis dan kerentanan ekonomi merupakan bagian penting dalam pemaknaan upah layak. Para pekerja memandang upah sebagai sarana untuk mempertahankan stabilitas kehidupan ketika menghadapi berbagai tekanan ekonomi yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, kelayakan upah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memenuhi kebutuhan hidup pada saat ini, tetapi juga oleh kemampuan penghasilan dalam memberikan perlindungan terhadap risiko ekonomi yang mungkin muncul di masa mendatang. Temuan ini menegaskan bahwa makna upah layak dibangun melalui pengalaman hidup yang bersifat dinamis, dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi, serta terus berkembang sesuai dengan realitas yang dihadapi oleh pekerja dalam kehidupan sehari-hari.

6. Esensi Makna Upah Layak

Sintesis terhadap seluruh pengalaman partisipan menunjukkan bahwa upah layak dimaknai sebagai pengalaman yang utuh dan multidimensional, yang tidak hanya berkaitan dengan besarnya penghasilan, tetapi juga dengan kemampuan penghasilan tersebut dalam menopang berbagai aspek kehidupan pekerja. Melalui pengalaman yang mereka alami, para partisipan memandang upah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjalankan tanggung jawab terhadap keluarga, membangun kemandirian sebagai individu yang bekerja di daerah perantauan, memperoleh rasa aman di tengah ketidakpastian pekerjaan, serta menghadapi berbagai risiko ekonomi yang dapat muncul sewaktu-waktu. Seluruh pengalaman tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan makna mengenai upah layak yang lahir dari realitas kehidupan pekerja sektor industri di Kabupaten Karawang.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemaknaan upah layak diawali dari pengalaman memenuhi kebutuhan hidup sebagai kebutuhan paling mendasar. Para pekerja memandang bahwa penghasilan yang diterima harus mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari secara berkelanjutan sehingga mereka dapat menjalankan kehidupan secara layak. Namun, makna tersebut tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan individu. Seiring bertambahnya tanggung jawab sosial, terutama terhadap pasangan, anak, maupun orang tua, upah berkembang menjadi sarana untuk menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa upah memiliki fungsi sosial yang melekat pada peran pekerja sebagai anggota keluarga, sehingga kelayakan upah selalu dihubungkan dengan kemampuan menjalankan tanggung jawab tersebut.

Bagi pekerja yang berasal dari luar Kabupaten Karawang, pengalaman merantau memberikan dimensi baru terhadap pemaknaan upah. Mereka tidak hanya menghadapi tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri, tetapi juga tetap memikul tanggung jawab terhadap keluarga di daerah asal. Kondisi tersebut membentuk pemahaman bahwa upah layak merupakan penghasilan yang mampu memberikan keseimbangan antara kebutuhan pribadi, biaya hidup di daerah perantauan, dan kewajiban membantu keluarga. Dengan demikian, pengalaman merantau memperlihatkan bahwa makna upah dibentuk melalui proses adaptasi terhadap lingkungan sosial dan ekonomi yang baru, sekaligus melalui upaya mempertahankan hubungan dengan keluarga yang berada di tempat asal.

Selain itu, pengalaman menghadapi ketidakpastian kerja dan kerentanan ekonomi menunjukkan bahwa pekerja memaknai upah layak sebagai sumber rasa aman. Penghasilan yang diterima tidak hanya dinilai berdasarkan jumlahnya, tetapi juga berdasarkan kemampuannya dalam memberikan kepastian terhadap keberlangsungan kehidupan ketika menghadapi berbagai risiko pekerjaan maupun perubahan kondisi ekonomi. Para partisipan mengungkapkan bahwa meningkatnya biaya hidup, kebutuhan yang tidak terduga, serta ketidakpastian hubungan kerja menjadi faktor yang memengaruhi persepsi mereka mengenai kecukupan penghasilan. Oleh karena itu, upah layak dipahami sebagai penghasilan yang mampu memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk kerentanan ekonomi yang mungkin dihadapi oleh pekerja dan keluarganya.

Dalam perspektif fenomenologi transendental Clark Moustakas, pengalaman hidup yang dialami para partisipan merupakan dasar terbentuknya esensi suatu fenomena. Melalui proses *epoche*, *phenomenological reduction*, *imaginative variation*, dan *synthesis of meanings and essences*, penelitian ini menemukan bahwa esensi pemaknaan upah layak tidak terletak pada

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

nominal penghasilan yang diterima, melainkan pada makna yang dibangun pekerja melalui pengalaman hidup mereka. Pengalaman memenuhi kebutuhan hidup, menjalankan tanggung jawab keluarga, membangun kemandirian, menghadapi ketidakpastian kerja, dan mengelola kerentanan ekonomi merupakan pengalaman-pengalaman yang secara konsisten muncul pada seluruh partisipan. Kesamaan pengalaman tersebut membentuk inti makna bahwa upah layak merupakan penghasilan yang memungkinkan pekerja menjalani kehidupan secara bermartabat, aman, dan berkelanjutan.

Temuan penelitian ini juga memperkuat perspektif interpretatif Mark Bevir yang menjelaskan bahwa makna suatu kebijakan publik tidak bersifat tunggal, melainkan dibentuk melalui interpretasi individu berdasarkan pengalaman dan konteks sosial yang mereka miliki. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan penetapan upah minimum dipahami secara berbeda oleh setiap pekerja karena masing-masing memiliki kondisi kehidupan, tanggung jawab keluarga, serta pengalaman ekonomi yang berbeda. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan pengupahan tidak cukup dinilai dari kesesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari kemampuan kebijakan tersebut menjawab kebutuhan nyata yang dirasakan oleh pekerja dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan ini juga sejalan dengan konsep *decent work* yang dikemukakan oleh International Labour Organization (ILO), yang menegaskan bahwa pekerjaan yang layak tidak hanya memberikan penghasilan yang memadai, tetapi juga menjamin keamanan kerja, perlindungan sosial, kesempatan berkembang, serta penghormatan terhadap martabat pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para partisipan memaknai upah layak dalam kerangka yang lebih luas daripada sekadar besaran pendapatan. Bagi mereka, upah yang layak adalah penghasilan yang mampu memberikan rasa aman, menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga, mendukung proses kemandirian, serta membuka harapan terhadap kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, pemaknaan pekerja terhadap upah layak memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip *decent work* yang menempatkan kesejahteraan pekerja sebagai tujuan utama hubungan industrial.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fenomenologi dalam bidang kebijakan publik dan ketenagakerjaan dengan menunjukkan bahwa upah layak merupakan konstruksi pengalaman yang bersifat subjektif, kontekstual, dan multidimensional. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak mengukur upah melalui indikator ekonomi dan regulasi, penelitian ini memperlihatkan bahwa pengalaman hidup pekerja menjadi faktor utama dalam membentuk makna upah layak. Temuan ini memperkaya pemahaman mengenai implementasi kebijakan pengupahan dengan menempatkan pekerja sebagai aktor yang secara aktif menginterpretasikan kebijakan berdasarkan realitas kehidupan yang mereka alami.

Berdasarkan keseluruhan sintesis tersebut, dapat dipahami bahwa esensi makna upah layak bagi pekerja sektor industri di Kabupaten Karawang adalah kemampuan penghasilan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan melalui terpenuhinya kebutuhan hidup, terlaksananya tanggung jawab terhadap keluarga, terciptanya kemandirian dalam menjalani kehidupan, hadirnya rasa aman di tengah ketidakpastian kerja, serta kemampuan menghadapi kerentanan ekonomi secara berkelanjutan. Esensi tersebut menunjukkan bahwa upah layak bukan sekadar persoalan nominal, tetapi merupakan pengalaman hidup yang mencerminkan kesejahteraan, martabat, dan kualitas kehidupan pekerja secara menyeluruh.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan mengungkap pemaknaan upah layak berdasarkan pengalaman pekerja sektor industri di Kabupaten Karawang melalui pendekatan fenomenologi transendental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja memaknai upah layak tidak hanya sebagai besarnya penghasilan, tetapi sebagai kemampuan upah dalam memenuhi kebutuhan hidup, menjalankan tanggung jawab keluarga, memberikan rasa aman dalam bekerja, serta mendukung harapan terhadap masa depan. Makna tersebut terbentuk melalui pengalaman hidup setiap pekerja sehingga bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, serta tanggung jawab yang

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

berbeda pada masing-masing individu. Temuan ini menegaskan bahwa upah layak merupakan konstruksi pengalaman hidup yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan kemanusiaan.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkaya kajian kebijakan pengupahan melalui perspektif fenomenologi transendental yang menempatkan pengalaman pekerja sebagai dasar pembentukan makna upah layak. Secara praktis, hasil penelitian mengindikasikan bahwa perumusan dan evaluasi kebijakan pengupahan perlu mempertimbangkan pengalaman nyata pekerja selain indikator ekonomi dan ketentuan normatif. Penelitian ini masih terbatas pada pekerja sektor industri di Kabupaten Karawang sehingga temuan belum dapat digeneralisasikan pada konteks lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan sektor dan wilayah yang lebih beragam serta mengombinasikan pendekatan fenomenologi dengan perspektif teoritis lain untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pemaknaan upah layak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah berkenan meluangkan waktu dan berbagi pengalaman selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing atas arahan dan masukan yang diberikan, serta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dan diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ahunaya, D., Purba, G. R., Sari, I. P., Khairunnisa, R., Aulina, P., Lubis, U., Yusnaldi, E., & Negeri, I. (2025). Dampak Kenaikan Upah Minimum terhadap Kesejahteraan Buruh di Sektor Industri. Jurnal Mudabbir, 5, 200–211.

Astri, A., Asri, L. R., & Gunawan, P. W. (2013). Pengaruh Perilaku Kerja, Lingkungan Kerja, dan Interaksi Sosial terhadap Kepuasan Kerja. Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi, 3.

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1991). The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. London: Penguin Books.

Blumer, H. (1986). Symbolic Interactionism: Perspective and Method. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (3rd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Derung, T. N. (2024). Interaksionisme Simbolik dalam Kehidupan Bermasyarakat.

Ghai, D. (2003). Decent Work: Concept and Indicators. International Labour Review, 142(2), 113–145.

International Labour Organization. (2022). Global Wage Report 2022–2023: The Impact of Inflation and COVID-19 on Wages and Purchasing Power. Geneva: International Labour Office.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Beverly Hills, CA: SAGE Publications. Moleong, L. J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moustakas, C. (1994). Phenomenological Research Methods. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

van Manen, M. (2014). Phenomenology of Practice: Meaning-Giving Methods in Phenomenological Research and Writing. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.